**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**

Sebelum memutuskan akan melakukan penelitian dengan judul “Re-Orientasi Kebijakan Luar Negeri Filipina Pasca Kecaman Amerika Serikat Terkait War On Drugs Filipina”, penulis telah mereview *Journal of Current Southeast Asian Affair* tahun 2016 dari Danilo Andres Reyes yang berjudul *The Spectacle of Violence in Duterte’s War on Drugs*. Jurnal tersebut dibagi kedalam tiga bagian. Bagian pertama membahas nilai politik dari suatu kekerasan pada tubuh manusia atau *human body* untuk menegakkan kedisiplinan, sebagai material untuk membawa pesan-pesan politik, dan popularitas para pemimpin kekerasan seperti Rodrigo Duterte.

Bagian kedua membahas ciri khas kekerasan Duterte di Davao dibandingkan dengan Joseph Estrada dan Alfredo Lim (mantan presiden dan mantan walikota Manila), yang juga mengambil sikap keras terhadap para penjahat. Bagian ketiga membahas bagaimana praktek-praktek Duterte di Davao telah mempengaruhi mereka di kota-kota lain di Mindanao dan Visayas. Dari adanya perang narkoba di Filipina, muncul regu-regu kematian karena adanya penghargaan bagi polisi yang berhasil membunuh pelaku kriminal. Bagian tiga juga membahas bagaimana kekerasan ini telah menjadi bentuk modal politik yang digunakan oleh politisi lokal untuk memperoleh suara agar memenangkan pemilihan, terpilih kembali, dan ajang untuk memulai kembali karir politiknya setelah dikalahkan dalam pemilihan sebelumnya.

Menggunakan konsep *spectacle of the scaffold* dari Michel Foucault mengatakan bahwa kekerasan yang disetujui negara, baik berupa penyiksaan, peradilan dan eksekusi publik dimaksudkan untuk menunjukkan pelaksanaan kedaulatan kekuasaan melalui tubuh rakyatnya. Jenis hukuman ini mengirim pesan kepada subjek bahwa mereka akan di hukum dengan cara yang sama jika mereka melanggar hukum.

Duterte juga membagi orang-orang Filipina ke dalam dua kelompok: para pengedar narkoba, pecandu dan penjahat - yang dilihat sebagai pelanggar hukum yang kejam, bahaya bagi kesejahteraan sosial dan penghalang bagi pembangunan ekonomi - dan orang yang taat hukum dan takut akan Tuhan, yang dipandang sebagai korban kekerasan, sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi, dan dasar kesejahteraan generasi masa depan.[[1]](#footnote-1)

Jurnal kedua yang menjadi acuan penulis adalah jurnal *The Early Duterte Presidency in The Phillipines* yang ditulis oleh Mark R. Thompson pada tahun 2016 dari Journal of Current Southeast Asian Affairs yang menjelaskan tentang alasan kenaikan Duterte dalam kekuasaan, kampanye anti-narkoba kekerasannya, sifat pemerintahannya dan implikasinya.

Meskipun seperti yang di tunjukkan oleh Ronald. D. Holmes (presiden dari *Pulse Asia Research*) ada beberapa kemungkinan dalam kemenangannya dalam pemilihan presiden 2016 (terutama mengingat kelemahan dari kandidat utama lainnya), pesan-pesan hukum dan ketertiban Duterte menjadi nilai besar bagi rakyat Filipina. Didorong oleh kemarahan dan kecemasan rakyat Filipina kelas menengah akan keselamatan pribadinya, Duterte menggunakan kekerasan sebagai tontonan untuk para penjahat sambil meyakinkan warga negara yang baik bahwa mereka aman, seperti yang telah dijelaskan dalam jurnal pertama.[[2]](#footnote-2)

Jurnal ketiga yang menjadi acuan penulis adalah “*Duterte and His Quixotic War On Drugs*” yang ditulis oleh Lowell B. Bautista pada tahun 2017 dari University of Wollongong. Dalam jurnalnya Lowell menjelaskan sekilas mengenai profil Duterte. Lowell menjelaskan bahwa perang terhadap narkoba telah menjadi kebijakan negara yang tidak tertulis untuk membunuh orang secara ekstra-yudisial, dengan gaya main hakim sendiri, tanpa proses hukum apa pun. Duterte menyebutnya Rencana Operasi Tokhang atau *Operation Plan Tokhang*, perangnya terhadap obat-obatan terlarang, yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.[[3]](#footnote-3)

Dalam jurnal ini membahas tentang negara yang memiliki monopoli kekuasaan, melalui dukungan, pengarahan, dan pengesahan pejabat tertinggi negeri itu dapat membunuh ribuan orang. Ini bukan hanya masalah legalitas tetapi salah satu legitimasi, karena ketika aparatus negara digunakan untuk membunuh warga Filipina tanpa proses hukum yang semestinya, pemerintah Filipina menggunakan monopoli kekuasaannya dalam menodai kontrak sosial dengan rakyat. Dan Lowell mengatakan bahwa cara untuk menghentikannya adalah publik harus mengecam yang dilakukan Duterte, terutama rakyat Filipina yang wajib melakukan seruan untuk menghentikan *War On Drugs* di Filipina tersebut.

Selain itu, penulis juga mengacu pada jurnal keempat yaitu dari *Guangxi Academy of Social Sciences, Institute of Southeast Asian Studies* tahun 2014 yang di tulis oleh Bobby M. Tuazon, dengan judul “*The Highs And Lows Of Philippines-China Relations: Current Situation and Prospects”* untuk mengetahui bagaimana sejarah dari hubungan Filipina dan China. Apakah kedua negara tersebut memiliki hubungan baik secara *history* atau hanya sejak di bawah kepemimpinan Duterte saja.

Pada bagian awal, jurnal ini menjelaskan tentang sejarah hubungan Filipina – China. Mulai dari masuknya etnis Cina dari Kanton pada abad ke 9 dan melakukan perdagangan ke Filipina. Hingga terjadi pembantaian pada etnis China di Filipina yang menolak untuk menganut agama Katolik. Karena pada saat itu Spanyol yang sedang menguasai Filipina mencegah penyebaran ideologi komunis.

Kemudian bagian selanjutnya menjelaskan tentang hubungan diplomatik Filipina – China yang naik turun. Sejak didirikannya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, hubungan diplomatik dan perdagangan Filipina dipertahankan dengan Taiwan tanpa kontak resmi apa pun yang dibentuk dengan RRC. Lalu dibawah Presiden Ferdinand E. Marcos, Filipina mulai membuka hubungan diplomatik dengan China.

Perubahan diplomasi ini terjadi karena mengikuti kebijakan AS (aliansi Filipina) di bawah Presiden Richard Nixon sudah dalam diskusi dengan para pemimpin China, yang dipimpin oleh Ketua PKC Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai, tentang prospek membangun hubungan antara AS – China. Sehingga tak terhindarkan bagi Filipina untuk mengikuti memiliki hubungan diplomatik dengan China.

Hubungan Filipina dikatakan naik turun karena walaupun terdapat kerjasama khususnya dalam insfrastruktur, terjadi banyak masalah diplomatik yang menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan Manila pada Kebijakan Satu-China. Hubungan Filipina – China semakin buruk saat di bawah kepemimpinan Beniqno S. C. Aquino III.

Aquino III tidak menindak lanjuti dan tidak meminta maaf kepada China atas masalah penembakan tujuh orang turis Hongkong di Rizal Park Filipina. Selain itu juga terjadi penembakan seorang nelayan Taiwan oleh seorang anggota Penjaga Pantai Filipina pada tahun 2013. Disisi lain, Filipina mendesak pemerintah China untuk menghentikan eksekusi tersangka "keledai narkoba" Filipina (atau kurir narkoba ilegal) oleh pihak berwenang China, namun hal tersebut tidak diperhatikan oleh China. Titik terendah dari hubungan Filipina – China adalah sengketa Laut Cina Selatan, yang hingga saat ini masih bermasalah.

Keempat literatur review yang telah dijelaskan di atas, dengan beberapa artikel yang telah dikumpulkan selama masa penelitian adalah sebagai dasar penulis membuat penelitian tentang “Re-Orientasi Kebijakan Luar Negeri Filipina Pasca Respon Amerika Serikat Terhadap *War On Drugs* Filipina.”

1. **Kerangka Teoritis**

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa suatu masalah yang dibahas, diperlukan sebuah landasan teori dari pakar hubungan internasional dan konsep ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Studi hubungan internasional mencakup disiplin ilmu yang luas dan umum, serta disiplin ilmu hubungan internasional saling berkaitan dengan ilmu lainnya. Hubungan internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, padahal ilmu hubungan internasional mencakup unsur-unsur lain seperti sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Dalam artian lain Hubungan Internasional merupakan pola interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintahan dan perusahaan multinasional.[[4]](#footnote-4) Menurut **Stanley Hoffman** dalam bukunya yang berjudul “*Contemporary Theory in International Relation*” bahwa definisi **Hubungan Internasional** adalah :

**“Studi sistematis mengenai fenomena yang bisa diamati yang mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan perilaku dan untuk mengungkapkan karakteristik tipe-tipe hubungan antara unit-unit nasional.”**

Stanley juga menjelaskan tentang perubahan dalam hubungan internasional salah satunya meliputi perubahan pada aktor dalam hubungan internasional. Hal ini diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional.[[5]](#footnote-5)

**Mc. Clelland mendefinisikan Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.[[6]](#footnote-6)**

* + - 1. **Konsep Politik Luar Negeri**

Pengertian politik luar negeri secara umum adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Yaitu seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara atau sistem tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintahan lainnya.

Definisi lain politik luar negeri (*foreign policy*) yaitu merupakan strategi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional negara tersebut di dalam kancah dunia internasional. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kebijakan dan strategi politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional masing masing negara.

Dalam setiap negara terdapat kebijakan yang menjadi acuan berjalannya sistem pemerintahan. **Kebijakan** menurut pendapat **Carl Friedrich**bahwa:

**“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.**

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Membahas konsep politik luar negeri, yang mempengaruhi hubungan antarnegara adalah Kebijakan Luar Negeri. Kebijakan luar negeri mencerminkan kepentingan dalam negeri yang akan dipromosikan ke luar negeri. Dengan kata lain kebijakan luar negeri suatu negara merupakan bagian dari politik dalam negerinya dan oleh karenanya kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri memiliki tujuan yang sama.[[7]](#footnote-7)

Kebijakan luar negeri menurut **John P**. Mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu:

1).Kebijakan luar negeri sebagai orientasi

2).Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (as a set of commitment to and plan for action), dan

3).Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi dimana dalam fase ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian situasi di lingkungan eksternal.[[8]](#footnote-8)

Untuk dapat mengerti dinamika dari kebijakan politik luar negeri, hal yang penting untuk diperhatikan adalah proses pembentukan kebijakan politik luar negeri tersebut. Para ahli kemudian berusaha menjelaskan peran aktor dan struktur yang selalu terlibat dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri. Hubungan erat antara kedua faktor tersebut, dikemukakan oleh **Christopher Hill**, yaitu:

***“Foreign policy making is a complex process of interaction between many actors, differentially embedded in a wide range of different structures. Their interaction is a dynamic process, leading to the constant evolution of both actors and structures.”[[9]](#footnote-9)***

Hal ini menunjukkan peranan aktor dan struktur dalam suatu negara sangatlah penting dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri. Aktor-aktor yang paling berperan penting adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau sekretaris negara, parlemen, partai politik, dan lain-lain. Aktor-aktor inilah yang memiliki tanggung jawab politik dalam pembentukan kebijakan, yang dimulai dari kebijakan domestik yang kemudian berimplikasi pada kebijakan politik luar negeri.

**David Easton** mengamati kehidupan politik sebagai suatu jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem. Adapun unit dalam sistem politik merupakan tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. *Input* dalam sistem politik dapat berupa tuntutan (*demand)* dan dukungan *(support*) yang setelah melalui proses konversi akan berubah menjadi output (keputusan atau kebijakan). *Output* yang dihasilkan setelah melalui proses konversi, setelah ada umpan balik (*feedback*) ke lingkungan dapat menghasilkan *input* baru.

Perlu adanya manajemen bagi *demands*. Kelebihan *demands* akan mengakibatkan beban berlebihan (*overload*) yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap *demands*, baik melalui institusi, budaya maupun *struktural gatekeepers*. Selain *demands*, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan *demands* mana yang patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman.

Dalam penelitian ini mulai dari kebijakan dalam negeri Filipina terkait *War On Drugs* hingga kebijakan luar negeri Filipina akan dibahas dan dianalisis proses dan penyebabnya. Penulis juga akan menganalisis bagaimana *input* dan *output* dalam proses kebijakan menurut David Easton. Dan perlu diketahui dengan pendekatan konstruktivis bagi Amerika Serikat yang menjadi ancaman dalam isu perang narkoba Filipina ini adalah *human security.*

* + - 1. **Konsep *Balance of Threat***

Sebelum berbicara mengenai *Balance of Threat,* harus dimengerti apa yang di maksud dengan *balancing* dan *threat* (ancaman). *Balancing* biasa dilakukan negara yang memang cenderung berpikir bahwa strategi ini lebih aman karena aliansi dibentuk dengan negara-negara yang yang tidak dengan mudah mendominasi sekutu mereka dengan kata lain negara-negara ini termasuk dalam kategori yang tidak memiliki power besar dan kekuatan yang tidak besar pula, dimana memang aliansi ini tujuannya untuk menghindari didominasi oleh negara-negara hegemon pemegang kutub yang mendominasi.

Alasan kedua adalah jika bergabung dengan negara yang secara kapabilitas lemah maka negara yang memutuskan untuk *balancing* akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan pengaruhnya pada negara yang secara kapabilitas lebih lemah. Namun, sebaliknya jika bergabung dengan negara yang lebih kuat justru akan mengurangi kesempatan untuk berpengaruh dalam aliansi tersebut.

*Balancing* dan *bandwagoning* lebih akurat dijelaskan sebagai respon terhadap ancaman, pendekatan keseimbangan dari ancaman menyarankan tiga faktor penting (sumber ancaman) untuk dipertimbangkan untuk lebih memahami penyeimbangan atau bandwagoning, yaitu: kekuatan agregat, kedekatan geografis , kekuatan ofensif dan niat agresif.[[10]](#footnote-10)

Penggunaan kata *threat*ditujukan untuk memperkecil cakupan mengenai tolak ukur penelitian ini mengingat konsep power masih terlalu luas. Dalam buku *Origins of Alliances,* Stephen M. Walt menentang konsep *balance of power*, dan menjelaskan bahwa negara tidak melakukan *balancing* berdasarkan *power,* tetapi dari ancaman yang diberikan negara yang di anggap mengancam.

*Balance of Threat* menawarkan tiga parameter untuk menganalisis apakah suatu negara melakukan penyeimbangan ancaman atau tidak.Pertama, kekuatan dan kelemahan: semakin kuat negara, maka lebih mungkin untuk menyeimbangkan daripada mengikuti dan sebaliknya. Namun, negara-negara yang lemah dapat diharapkan untuk menyeimbangkan ketika terancam oleh negara-negara dengan kemampuan yang kira-kira sama, tetapi mereka akan cenderung mengikuti ketika terancam oleh kekuatan besar.

Kedua, ketersediaan sekutu: ketika terancam oleh suatu negara, negara tersebut akan memilih untuk bergabung dengan negara yang mengancam jika mereka gagal menemukan sekutu potensial yang memiliki minat yang sama.

Ketiga, perdamaian dan perang: sejarah telah menunjukkan bahwa negara cenderung menyeimbangkan masa perawalan, karena mereka mencoba memblokir kekuatan yang mengancam. Tetapi ketika pada akhirnya tetap terjadi perang, negara-negara tertentu cenderung bergabung dengan para pemenang.[[11]](#footnote-11)

Teori Bandwagoning oleh **Stephen M. Walt**mengungkapkan bahwa negara yang menghadapi ancaman eksternal akan melakukan aliansi terhadap pihak yang paling mengancam.[[12]](#footnote-12)

Jadi dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah tentang arah kebijakan luar negeri Filipina dibawah kepemimpinan Duterte dengan memakai konsep Balance of Threat. Penulis memakai konsep Balance of Threat dan teori Bandwagoning karena indikator Negara China sebagai ancaman bagi teritorial Filipina yang memiliki historis permasalahan sengketa Laut Cina Selatan.

* + - 1. **Konsep Idiosinkretik**

Menurut pemikiran **James N. Rosenau**, ada empat sumber-sumber yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri yaitu salah satunya idiosinkretik. Idiosinkretik merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.

Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai. Secara lebih singkat, **James Couloumbis** dan **Wolfe** mendefinisikan faktor idiosinkretik sebagai salah satu variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra (*image*), dan karakteristik pribadi individu pembuat keputusan.Faktor idiosinkretik dikenal juga dengan istilah persepsi elit. Didefinisikan sebagai hal-hal yang melekat pada seseorang (pemimpin) sehingga mempengaruhi pola pikir, persepsi, dan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan serta pengambilan keputusan.

**Alan C. Elms**, mengartikan *personality* dalam bukunya *Personality in Politics*, bahwa:

***“Personality as including any individual psychological variations that influence behavior. Some psychological reactions are found in equal intensity in virtually all individuals, given the right stimulus; these I say little about. Personality enters the picture when a psychological characteristic common to all people is found to vary in intensity or expression among different individuals (for example, sexual desires), or when a characteristic is found in some people and not in others (for example, achievement motivation).”[[13]](#footnote-13)***

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *personality* merujuk kepada kepribadian dan faktor-faktor psikologi seseorang dalam bertindak maupun berkata-kata, dan dalam menghadapi suatu keadaan atau situasi. Sedangkan, kata politik yang dimaksud merujuk kepada tindakan-tindakan dalam pemerintahan maupun dalam setiap elemen masyarakat yang mengandung unsur politik; yaitu adanya faktor yang dipengaruhi dan faktor mempengaruhi. Kepribadian bukanlah sifat, akan tetapi kepribadian yang membentuk sikap seseorang, bukan sebaliknya.

Untuk itu peneliti akan menganalisis kebijakan *War On Drugs* dengan memakai konsep Idiosinkretik, dimana melihat nilai-nilai, pengalaman, sifat, dan juga bakat Duterte sebagai seorang pemimpin, apakah mempengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh Duterte.

* + - 1. **Konsep Keamanan**

Keamanan (*security*) adalah bentuk khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik. Namun tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan. Dalam konsepsi klasik, keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar negara khususnya dalam upaya memperluas imperium daerah jajahan membawa definisi *security* hanya ditujukan kepada bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Dalam pendekatan tradisional, negara *(state*) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara.[[14]](#footnote-14)

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis.

Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu **keamanan non tradisional**. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non state actors*). Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara/ keamanan manusianya.[[15]](#footnote-15)

Konsep keamanan menurut **Barry Buzan**, sebagaimana halnya konsep-konsep politik internasional lainnya adalah hasil dari proses konstruksi sosial, proses ini disebut juga sebagai sekuritisasi (*securitization).*

**Sekuritisasi berawal dari pernyataan (*speech act)* oleh agen-agen tertentu (pejabat pemeritah, tokoh masyarakat, dan aktivis NGO) bahwa suatu hal yang menjadi rujukan (*referent object)* berwujud hal-hal yang dianggap berpotensi mendatangkan bencana adalah merupakan ancaman bagi keamanan individu maupun keamanan nasional dan disampaikan kepada publik sebagai target *(target audience*)agar menjadi tanggap (*alert)* dan kemudian mendukung upaya penyelesaian secara darurat (*emergency response)* di luar kebijakan normal (*outside normal policies).[[16]](#footnote-16)***

Pendekatan *securitization* menaruh perhatian pada konsep masyarakat keamanan (*societal security*) daripada keamanan yang berasal dari kedaulatan negara (*state sovereignty*). Gagasan utama dari pendekatan ini adalah menolak dominasi pihak tertentu (apakah negara atau masyarakat) dalam menafsirkan dan menetapkan keamanan. Keamanan dipandang sebagai dikonstruksikan secara sosial (*socially constructed*) oleh elit tertentu. Keamanan menjadi suatu praktek `*self referential*`. Suatu isu menjadi isu keamanan tidak semata-mata karena eksistensi ancaman keamanan yang nyata-nyata terjadi melainkan karena isu tersebut dipersepsikan sebagai ancaman.[[17]](#footnote-17)

Yang dimaksud **ancaman** menurut **Barry Buzan** adalah :

**“Setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Adapun dua bentuk ancaman yaitu ancaman tradisional (ancaman militer) dan ancaman non-tradisional (non-militer).”[[18]](#footnote-18)**

Akibat tingginya kriminalitas yang terjadi di Filipina sebagian besar berkaitan dengan isu narkoba, Duterte menganggap narkoba sebagai ancaman negara. **Narkoba** merupakan bahan, obat atau zat bukan makanan, yang jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikkan akan menyebabkan ketergantungan. Pada awalnya obat ini ditujukan untuk pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena akan mempengaruhi daya kerja otak (susunan saraf pusat).

Dengan semakin tajamnya peredaran narkoba di suatu negara, hal ini bisa mengancam keamanan nasional dari suatu negara itu sendiri. Menurut **Hadiman**, bahwa penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi sebuah ancaman keamanan negara atau keamanan nasional.[[19]](#footnote-19)

**Keamanan nasional yaitu sebuah upaya pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi aman bagi terselenggaranya pemerintah dan kehidupan berbangsa serta bernegara sehingga dapat meraih tujuan dan kepentingan nasional dari segala bentuk gangguan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.[[20]](#footnote-20)**

Barry Buzan mengatakan bahwa keamanan akan berkaitan dengan masalah seberapa mungkin usaha yang dilakukan oleh setiap individu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Sehingga isu-isu atau masalah yang mengancam keberlangsungan hidup suatu kelompok kolektif atau sebuah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kolektif tertentu akan dianggap sebagai suatu bentuk ancaman yang bereksistensi tinggi. Dengan demikian diperlukan sebuah tindakan atau aksi cepat untuk memprioritaskan isu tersebut agar segera ditangani dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia agar tidak akan menyebabkan terganggunya keamanan dan stabilitas suatu Negara.

**Tabel.1**

Untuk meredakan suatu ancaman, diperlukan suatu usaha yaitu kewajiban untuk melindungi atau lebih dikenal dengan konsep ***Responsibility to Protect*** “R2P”. Berdasarkan norma “R2P”, negara akan kehilangan kedaulatannya jika negara tidak dapat dan tidak mau melindungi warga negaranya sendiri dimana dalam kondisi dan situasi demikian memberikan hak sekaligus kewajiban bagi negara-negara lain dan atau organisasi internasional untuk melindungi warga negara tersebut.

Prinsip R2P ini berusaha untuk membingkai ulang perdebatan tentang intervensi kemanusiaan dalam hal kedaulatan negara. Secara khusus, itu menempatkan tanggung jawab utama pada negara untuk melindungi warganya sendiri. Ketika negara gagal, tanggung jawab baru akan jatuh ke masyarakat internasional.[[21]](#footnote-21)

Perlindungan ini termasuk, tetapi tidak selalu, pengerahan kekuatan militer atau intervensi militer serta membawa mereka yang bertanggung jawab untuk dituntut baik dibawah yuridiksi ekstra territorial atau yuridiksi universal. Akan tetapi “R2P” juga dapat mengambil bentuk tindakan yang tidak kontroversial seperti bantuan kemanusiaan atau jenis bantuan lainnya kepada korban. Dalam hal ini terdapat pergeseran konsep keamanan dari satu bentuk ke bentuk lainnya atau secara konkrit adalah pergeseran dari keamanan nasional (umumnya merujuk pada keamanan negara) menjadi keamanan sosial atau manusia (*societal and human security*).

Kebutuhan suatu negara menciptakan kepentingan nasional (*national interest).* Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. **Hans J. Morghenthau** mengatakan bahwa **kepentingan nasional** adalah :

**Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.[[22]](#footnote-22)**

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang di ciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik argumentasi yaitu semakin meningkatnya kriminalitas akibat tingginya pengguna narkoba, menjadi ancaman bagi keamanan nasional Filipina dan membuat Duterte melakukan *responsibility to protect* dengan membuat kebijakan *War On Drugs* untuk menjaga keamanan nasional Filipina.

***War On Drugs* atau perang terhadap narkoba di Filipina telah menjadi kebijakan negara yang tidak tertulis untuk membunuh orang secara ekstra-yudisial, dengan main hakim sendiri, tanpa proses hukum apa pun. Duterte menyebutnya Rencana Operasi Tokhang, perang terhadap obat-obatan terlarang, yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.[[23]](#footnote-23)**

Perang narkoba di Filipina ini mendapat respon dari Amerika Serikat yang menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Asasi Manusia karena Duterte berani mengambil langkah *Ekstra Judicial Killings* dalam memberantas dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di Filipina, dimana kebijakan yang diambil oleh Duterte menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Respon dari AS akan dianalisis oleh penulis dilihat dari indikator AS sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan adanya ketidaksepahaman antara AS dan Duterte terkait HAM.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka teoritis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan suatu hipotesis sebagai berikut :

“Dengan dijalankannya kebijakan *War On Drugs* di Filipina maka menimbulkan respon kritis dari Amerika Serikat dan berpengaruh pada kebijakan luar negeri Filipina.”

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Untuk membantu dan menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi oprasional variabel dan indikator konsep hipotesis di atas yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:  Dengan dijalankannya Kebijakan *War On Drugs* di Filipina | 1.Penyebab munculnya kebijakan War On Drugs di Filipina  2.Implementasi Kebijakan *War OnDrugs* di Filipina | Data Laporan dari PNP (*Philippine National Police)* tahun2015  Data (fakta) mengenai implementasi *War On Drugs* di Filipina yang memakai kekerasan, sumber :  The Spectacle of Violence in Duterte’s War on Drugs <https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/view/1012>  Duterte and His Quixotic War On Drugs  <http://ro.uow.edu.au/lhapapers/2866/> |
| Variabel Terikat:  Maka menimbulkan respon kritis dari Amerika Serikat dan berpengaruh pada kebijakan luar negeri Filipina | 3. Adanya perbedaan persepsi dalam melindungi HAM yang menimbulkan respon kritis dari AS terhadap *War On Drugs* Filipina  4.Reorientasi arah kebijakan luar negeri Filipina dari AS ke China | Data (fakta) AS mengkritik cara implementasi War On Drugs di Filipina yang dilakukan secara Extrajudicial Killings, sumber:  U.S Troubled By Increasing Extrajudicial Killings In Philippines  <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-usa/u-s-troubled-by-increasing-extrajudicial-killings-in-philippines-idUSKBN17M2KQ>  Data (fakta) Filipina menjauh dari AS, dan mulai berhubungan baik dengan China, sumber :  On the Philippines’ recent split with the Americans: Nationalism or Realpolitik?  <http://utsynergyjournal.org/2017/01/17/on-the-philippines-recent-split-with-the-americans-nationalism-or-realpolitik/> |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Tingginya kriminalitasdisebabkan oleh tingginya pengguna Narkoba

Securitisasi oleh Duterte dengan melakukan *War On Drugs* di Filipina

Amerika Serikat merespon dengan berupa kecaman pada *War On Drugs* di Filipina

Merenggangnya hubungan Filipina-Amerika Serikat, dan terjadi re orientasi kebijakan luar negeri pada China

1. Danilo Andres Reyes. *The Spectacle of Violence in Duterte’s “War on Drugs”*, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2016, 35, 3, hlm.111–137. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mark R. Thompson, Introduction to the Special Issue: *The Early Duterte Presidency in The Phillipines*, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2016, 35, 3, 3–14. [↑](#footnote-ref-2)
3. L. B. Bautista. *Duterte And His Quixotic War On Drugs.* (Australia: University of Wollongong, 2017). [↑](#footnote-ref-3)
4. Robert Jackson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional : Teori dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Stanley Hoffman. *Contemporary Theory in International Relations*, 1960, hlm.30. [↑](#footnote-ref-5)
6. Charles A. McClelland.. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem.* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hal. 27 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kirdi Dipoyudo, “Aspirasi Perdamaian: Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam *Analisis CSIS*, Tahun 1989. Hlm. 147 [↑](#footnote-ref-7)
8. JohnP. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making,* (New York: Holt Rinchant and Winston Inc. Chapter 3) [↑](#footnote-ref-8)
9. Christopher Hill. 2003. Terdapat dalam Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Tim Dunne. 2012. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Second Edition). New York: Oxford University Press. Hal. 114. [↑](#footnote-ref-9)
10. Stephen M. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power” dalam *International Security,* Vol. 9, No.4 (Spring, 1985), hlm. 5 [↑](#footnote-ref-10)
11. Stephen M. Walt, “The Origins of Alliances”,(Cornell University Press, 1990), Hlm. 29-32 [↑](#footnote-ref-11)
12. Stephen M. Walt, “Alliances : Balancing and Bandwagoning”, dalam *Anarchy and Its Consequences*, 1985, Hlm. 110-117. [↑](#footnote-ref-12)
13. Alan C. Elms, *Personality in Politics*, (USA: Harcourt Brace Jovanovich, 1976), Hal. V. [↑](#footnote-ref-13)
14. Al Araf & Anton Ali Abbas, et.al, “TNI-POLRI di Masa Perubahan Politik”, Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung, 2008. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-15)
16. Barry Buzan, ‘New Patterns of Global Security in the Twentieth Century’, *International Affairs*, 1991, Vol. 67 No.3, hlm. 439-451. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tan, Andrew & J.D, Kenneth Boutin, “Non- Traditional Security Issues in Southeast Asia”, Select Publishing for Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, 2001. [↑](#footnote-ref-17)
18. Barry Buzan, “People, State, and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era”. (Hampstead: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm.74. [↑](#footnote-ref-18)
19. Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya* (Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1995), hlm.11. [↑](#footnote-ref-19)
20. Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.43 [↑](#footnote-ref-20)
21. The Global Human Rights Regime, diakses dari *Council on Foreign Relations* <https://www.cfr.org/report/global-human-rights-regime> pada tanggal 14 Februari 2019 [↑](#footnote-ref-21)
22. Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. *Op.Cit*. Hal.115 [↑](#footnote-ref-22)
23. L. B. Bautista., *Duterte And His Quixotic War On Drugs,* (Australia: University of Wollongong, 2017). [↑](#footnote-ref-23)